

KOP KANTOR

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)
USULAN KEGIATAN TAHUN 2018

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---|---|
| KEMENTERIAN | NEGARA/LEMBAGA | : | (005) Mahkamah Agung RI |
| | | : | (01) Badan Urusan Administrasi |
| UNIT ESELON I | | : | |
| UNIT ESELON II/SATKER | | : | |
| PROGRAM | | : | |
| HASIL | | : | (005.01.02.1071) Pengadaan Sarana dan |
| KEGIATAN | | | Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung |
| | | : | (005.01.02.1071.998) Gedung/Bangunan |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | : | (005.01.02.1071.99.051) |
| JENIS KELUARAN (OUTPUT) | | : | Gedung/Bangunan |
| SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN | | : | M2 |
| VOLUME | | : | 9.745 M ² |
| DETIL KEGIATAN | | | Pembangunan Gedung 4 lantai dan 1 lantai basement Tahap Pertama |

I. Latar Belakang

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan dari kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2. Gambaran Umum

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada Pendekatan Anggaran Terpadu (*unifiedbudget*), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework/MTEF*) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Bagian Rencana Anggaran sebagai unit perencanaan di Mahkamah Agung RI, sangat penting untuk menilai dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan dan proses penganggaran, diharapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Pengadilan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Maka perlu ditunjang adanya sarana dan prasarana khususnya bangunan gedung kantor yang layak dan memadai sehingga pelayanan dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya perkara yang disidangkan di Kantor Pengadilan, namun tidak didukung dengan fasilitas layanan yang ada. Antara lain sarana kebutuhan ruang kerja kantor, ruang sidang, fasilitas umum berupa toilet, ruang tunggu sidang, ruang mediasi, tempat parkir, dan ruang ibu menyusui.

3. Gambaran Umum Singkat

a. Kajian Teknis

a.1. Kondisi Lahan

Dengan kondisi lahan (*existing*) yang ada, bangunan gedung Pengadilan, berhimpitan dengan bangunan pihak lain, sehingga tidak dapat dilakukan penambahan luas secara horizontal.

Gambar a.1.



a.2. Kondisi bangunan

Gedung kantor Pengadilandibangun pada tahun 1980-1981, sehingga umur bangunan sudah mencapai ± 35 Tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45 Tahun 2007 bahwa umur bangunan negara diperhitungkan 50 tahun. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20%.

Gambar a.2.



a.3. Kebutuhan Ruang Kerja

Jumlah data pegawai pada tahun 2015 mencapai ± 180 orang, terdiri dari:

- Hakim : 35 orang
- Pejabat Struktural : 9 orang
- Panitera Pengganti : 55 orang
- Jurusita : 10 orang
- Staf : 70 orang

Membutuhkan ruang kerja yang nyaman. Dimana, kondisi *existing* sudah tidak layak lagi.

Gambar a.3.



a.4. Kebutuhan Ruang Sidang

Dengan meningkatnya jumlah perkara yang disidangkan dari tahun ke tahun, yang saat ini bisa mencapai 250 perkara untuk pidana dan perdata dalam satu hari, sedangkan ruang sidang yang ada di kantor Pengadilansebanyak 8 ruang sidang (1 Ruang Sidang Utama, 6 Ruang Sidang Biasa dan 1 ruang sidang anak) maka kebutuhan ruang sidang yang ada saat ini, sudah tidak mencukupi lagi. Banyak sidang yang dilaksanakan di luar jam kerja. Selain itu, tingkat keamanan bagi hakim yang mempersidangkan perkara-perkara di Kantor Pengadilan kurang memadai, hal ini tidak didukung dengan adanya akses/jalur khusus Hakim ke ruang sidang.

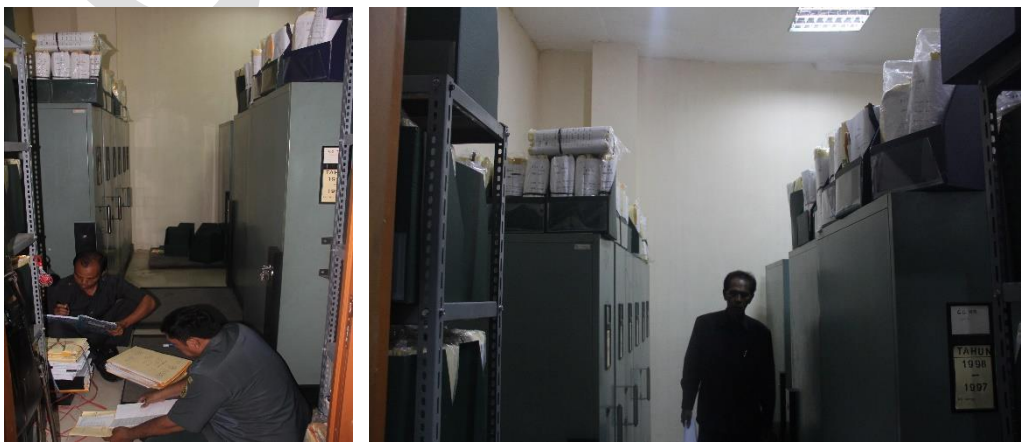
Gambar a.4.



a.5. Kebutuhan Ruang Arsip

Dengan bertambahnya jumlah perkara yang ada di Pengadilan, berkas perkara yang disimpan di ruang arsip juga semakin bertambah sehingga dibutuhkan ruang penyimpanan arsip yang lebih luas dan memadai. Adapun berkas perkara yang semua terdiri dari bahan kertas perlu penanganan yang ekstra guna menjaga kualitas dan kondisi berkas tersebut yang akan disimpan selama ±30 Tahun.

Gambar a.5.



a.6. Kebutuhan Ruang Tahanan

Ruang tahanan yang terdiri dari Ruang Tahanan Pria (dengan ukuran 3x8 m2), Ruang Tahanan Wanita (dengan ukuran 3x3 m2), dan Ruang Tahanan Anak (dengan ukuran 3x6 m2), sudah sangat tidak layak dengan kondisi (*existing*) yang ada. Berkaitan dengan keamanan tahanan terhadap jangkauan pengunjung, diperlukan ruang tahanan yang aman, dan memadai.

Gambar a.6.



a.7. Kebutuhan Tempat Parkir

Kondisi saat ini untuk Pegawai Pengadilanyang membawa kendaraan pribadi berjumlah ±70 untuk kendaraan roda 4, dan ±100 untuk kendaraan roda 2, hal ini di luar kendaraan para pengunjung/tamu Pengadilan sehingga kondisi ini sangat tidak layak dengan kondisi yang ada, mengingat lokasi lahan di dalam maupun di luar kantor Pengadilansudah tidak mencukupi.

Gambar a.7.



a.8 Kebutuhan Ruang Rapat, Ruang Mediasi, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Tunggu, dan Toilet

Kondisi masing-masing ruangan tersebut saat ini sangat tidak memadai. Dimana Pengadilantidak memiliki ruang rapat, selama ini Pengadilan masih menggunakan ruang sidang utama dalam pelaksanaan rapat rutin evaluasi bulanan. Ruang Mediasi, Ruang Ibu Menyusui, Ruang

Tunggu, dan Toilet saat ini sudah tersedia di Kantor Pengadilannamun kondisinya sangat tidak layak.

Gambar a.8.



a.9. Kondisi Struktur Bangunan

Struktur bangunan yang ada saat ini (*existing*) terdiri dari 2 lantai, sedangkan kebutuhan ruang tidak dapat diperluas secara horizontal dikarenakan keterbatasan lahan. sehingga perluasan hanya dapat dilakukan secara vertikal. Yaitu dengan menambah struktur bangunan menjadi 4 lantai ke atas dan 1 lantai *basement*.

Gambar a.9.





Dari uraian kajian teknis di atas maka Pengadilansudah sepatutnya dibangun gedung yang baru bukan rehabilitasi maupun renovasi. Karena hal itu tidak dapat memenuhi kebutuhan Pengadilansebagai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus yang berlokasi di DKI Jakarta.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan (What)

1. Uraian Kegiatan, yaitu Pembangunan gedung 4 lantai dan 1 lantai basement tahap pertama.
2. Batasan Kegiatan, kegiatan tahap pertama pembangunan gedung 4 lantai dan 1 lantai basement diutamakan untuk pondasi tiang pancang serta pembangunan struktur sampai lantai 4, dan diharapkan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan penyelesaian/ finishing pembangunan gedung tersebut.

c. Maksud dan Tujuan (Why)

1. Maksud Kegiatan, yaitu untuk melakukan pembangunan gedung 4 lantai dan 1 lantai basement tahap pertama, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan.
2. Tujuan Kegiatan, diharapkan dengan adanya pembangunan gedung 4 lantai dan 1 lantai basement tersebut, menjadikan Pengadilanmenjadi peradilan yang moderen selain terkait

pemenuhan ruang dan penataan pelayanan yg baik, juga akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan.

d. Indikator Keluaran dan Keluaran

1. Indikator Keluaran yaitu terwujudnya gedung Pengadilan yang sesuai dengan standar pelayanan yang prima.
2. Keluaran yang diharapkan adalah dapat mewujudkan peradilan yang modern dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan.

e. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Where)

Kegiatan dilaksanakan dilokasi gedung lama Pengadilan

f. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (Who)

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab:

- Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Bendahara Pengeluaran
- Pejabat Penandatangan SPM

B. Penerima Manfaat

Adalah Para Pencari Keadilan, Hakim, Pegawai atau Instansi Lain yang menjadi mitra kerja

C. Strategi Pencapaian Kegiatan (How)

1. Metode Pelaksanaan

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan Pelaksanaan
- b. Pelaksanaan Kegiatan
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

3. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (Who)

- a. Pelaksana Kegiatan
- b. Penanggungjawab Kegiatan

- D. Jadwal Kegiatan (When)
1. Waktu pelaksanaan kegiatan
 2. Matrik pelaksanaan kegiatan

| Kegiatan | Semester 1 | | | | | | Semester 2 | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| Nama Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| a. Persiapan | | | | | | | | | | | | |
| b. Pengajuan | | | | | | | | | | | | |
| c. Persetujuan | | | | | | | | | | | | |
| d. Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
| e. Laporan Kegiatan | | | | | | | | | | | | |

E. Biaya Yang Diperlukan (How Much)

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar Rp.....,- (-----dh-----).Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta data dukung lainnya (terlampir).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan ...

ttd

Nama

NIP.

.....

Sekretaris

Kuasa Penggunaan Anggaran

ttd

Nama

NIP.